KOORDINASI LINTAS SEKTOR PROGRAM PEMBGUNAN MAHYANI DI DESA LUHUTO KECAMATAN BIAU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Alwaris Humonggio[1], Nuzlan Botutihe[2] Sri Lestari Gintulangi[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
alwarishumnggio@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine cross-sector coordination in the Mahyani Development Program in Luhuto Village. The type of research used is Descriptive Qualitative. The research results show that cross-sector coordination of the Mahyani Development Program in Luhuto Village is not optimal. This can be seen from the four indicators measured, namely unity of action, communication, division of work and discipline, where there are two indicators that are considered to have been fulfilled, namely indicators of unity of action and division of work. This can be seen from the existence of unity of view and division of tasks and functions related to the program mahyani development among existing stakeholders. Meanwhile, the other two indicators are deemed to have not been met, namely the communication indicator and the discipline indicator. This can be seen from the lack of good stakeholder communication with the target group as well as the commitment of the implementers which is still low and does not work consistently so that the implementation of the livable house construction program is not completed. in accordance with previously planned targets

Keywords: Mahyani Program Cross-Sector Coordination

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Lintas Sektor Pada Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Lintas Sektor Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto belum optimal. Hal ini terlihat dari keempat indikator yang diukur yakni kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, dimana terdapat dua indicator yang dianggap telah terpenuhi yakni indicator kesatuan tindakan dan pembagian kerja, hal ini terlihat dari adanya kesatuan pandangan dan pembagian tugas dan fungsi terkait dengan program pembangunan mahyani diantara stakeholder yang ada. Sementara dua indicator lainnya dianggap belum terpenuhi yakni yakni indicator komunikasi dan indicator disiplin, hal ini terlihat dari masih kurang baiknya komunikasi stakeholder dengan kelompok sasaran serta komitmen dari pelaksana yang masih rendah dan tidak bekerja secara konsisten sehingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang tidak terselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya

Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektor Program Mahyani

PENDAHULUAN.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Rumah selain sebagai kebutuhan dasar juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistem nilai. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain dengan melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman

Menurut BPS dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan didefinisikan sebagai“ ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak”. Permasalahan permukiman dan perumahan juga disebut sebagai salah satu hal yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, selain itu penduduk miskin menempati wilayah permukiman kumuh, hingga saat ini, masalah permukiman kumuh pun kian menjadi sorotan dunia. Pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar yang dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial.

Karateristik penduduk miskin biasa di temui di wilayah perdesaan salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian petani dan pedagang. Kabupaten Gorontalo dengan kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap wilayah antara perbukitan dari rangkaian dataran tinggi, dataran rendah dan begelombang, yang memiliki potensi menonjol di pertanian, perkebunan, tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan sasaran langsung kepada masyarakat miskin yang berada pada tingkat kemiskinan yang masuk dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah

melakukan berbagai program untuk menanggulanginya. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga masyarakat miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena ekonomi yang kurang baik untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata.

Dalam rangka peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya dibidang perumahan yang layak, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan program bantuan rumah layak huni atau yang biasa disebut dengan Mahayani dengan pemberian bantuan atau stimulant sebagai perwujudan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai komitmen dalam upaya penanggulangan rumah tidak layak huni.

Program Rumah Layak Huni (Mahayani) Kabupaten Gorontalo Utara hadir sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo Utara. Program ini bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong kemauan keluarga miskin penerima bantuan untuk bersama-sama keluarga penerima bantuan yang lainnya bergotong royong memperbaiki rumah dengan dibantu juga oleh masyarakat sekitar. Tentunya keterlibatan ini juga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. karena masing-masing lintas sektor terkait yang bertanggungjawab dalam upaya kelancaran dan mencapaian tujuan.

Demikian halnya dengan Pemerintah Desa melalui anggaran dana desa pun turut ikut dalam program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu atau masuk dalam kategori miskin. Dana desa dapat digunakan sebagaimana amanat Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang memungkinkan Pemerintah desa untuk membantu masyarakatnya atau warganya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Adapun kriteria umum rumah tidak layak huni ditetapkan ialah: a) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; b) Kepala keluarga/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang

layak bagi kemanusiaan; c) Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat; d) Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati; e) Memiliki rumah atas tanah milik sendiri yang dibutikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/ desa.

Salah satu desa yang mengimplementasikan anggaran dana desa untuk pembangunan rumah layak huni adalah Desa Luhuto Kecamatan Biau dan Perbup Gorontalo Utara No 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni dan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjadi acuan bagi pemerintah desa melaksanakan pembangunan fisik khususnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak yang akan menentukan ketepatan sasaran dan pencapaian program serta melaksanakan sosialisasi dan pemantauan program. Efektivitas program bantuan RTLH dinilai dari kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan atau target awal program yang telah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam struktur kerja program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin mulai dari Pemerintah Kabupaten sebagai penyalur dan pemberi bantuan, Pemerintah Desa Luhuto, Pihak Pendamping, dan Pengawas. Sementara pihak lainnya yang juga terlibat dalam program tersebut adalah pihak penyedia bahan bangunan (toko) dan juga masyarakat sebagai penerima bantuan

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih seringkali terjadi ketidaksesuaian, dimana hal ini seringkali dikarenakan kurang terjalinnya koordinasi yang baik antar stakeholder di Desa. Misalnya saja data terkait dengan masyarakat penerima manfaat program mahayani yang dimiliki oleh pihak Kabupaten atau dalam hal ini Dinas terkait, berbeda dengan data hasil verifikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sehingga harus dilakukan pengecekan kembali dan dilakukan penyesuaian data terbaru dan tentu saja berdampak pada penggunaan waktu serta anggaran. Hal yang ditaktukan adalah terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat dikarenakan terdapat masyarakat yang menerima bantuan rumah mahayani dengan kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara terdapat masyarakay yang sesuai dengan kriteri penerima manfaat program namun tidak mendapatkan bantuan.

Selain itu sosialisasi tentang adanya program pembangunan rumah

layak huni sangat kurang sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya program bantuan ini dan apa kreteria untuk lolos dan berhak mendapat bantuan mahayani. Tercatat jumlah rumah mahayani yang berhasil dibangun di Desa Luhuto adalah 8 unit dengan tingkat penyelesaian 100 persen. 4 unit masih dalam tahap pengerjaan atau tingkat penyelesaian 60 persen. Sementara jumlah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang ditargetkan adalah 20 unit

Hal seperti ini dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu kurang tepatnya penerima atau salah sasaran dalam pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni dan berdampak merugikan secara langsung ke pemerintah dan masyarakat. Fakta lainnya adalah masih ditemukan penerima bantuan yang pembangunan rumahnya belum selesai sampai batas waktu yang ditargetkan bahkan sampai lewat tahun anggaran yang telah di sepakati. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah baik itu pemerintah Desa maupun pemerintah Kabupaten. Penyaluran bantuan yang tidak tuntas akan mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal, penyelesaian masalah rumah tidak layakhuni tidak tuntas dalam satu tahun anggaran dan efektivitas program bantuan pembangunan rumah layak huni di Desa Luhuto ataupun di Kabupaten Gorontalo Utara tentu di pertanyakan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini antara lain;

Siti mubaroqah, implementasi program pembangunan rumah layak huni di desa sanggatan utara tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015. hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukanoleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014

Syafi'i (2019), Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih melakukan pendalaman terhadap Koordinasi Lintas Sektor Pada Program

Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara" dengan menggunakan 4 indikator yakni; Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja dan Disiplin

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sugiyono (2013);

Pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait dengan Koordinasi Lintas Sektor Pada Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto

Sarwono (2006) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun infroman dalam penelitian ini adalah; Pihak PRKP, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Pendamping Program, Pengawas, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulanginya. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga masyarakat miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena ekonomi yang kurang baik untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata.

Dalam rangka peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya dibidang perumahan yang layak, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan program bantuan rumah layak huni atau yang biasa disebut dengan Mahayani

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait dengan Koordinasi Lintas Sektor Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja pegawai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2017:88) diantaranya; kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin

Kesatuan Tindakan

Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan

bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Istilah koordinasi ini mungkin biasa kita temukan dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang atau bekerja secara kolektif dalam kelompok. Ini karena sebuah organisasi harus memiliki koordinasi yang baik. Untuk bisa memiliki koordinasi yang baik, maka sebuah kelompok membutuhkan pemimpin yang mampu mengatur anggotanya dengan baik. Ketika suatu kelompok dapat bekerja secara efektif dan harmonis, maka tujuan pun akan lebih mudah tercapai

Dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

Kesatuan tindakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keseuaian antara perencanaan pelaksanaan pembangunan Mahyani dengan tujuan pelaksanaan pembangunan Mahyani yang berjalan beririangan dari proses awal hingga akhir kegiatan pelaksanaan program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, kesatuan tindakan Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kesatuan pandangan terkait dengan program pembangunan mahyani diantara stakeholder yang ada, mulai dari proses penentuan atau pengusulan nama-nama calon penerima bantuan hingga pada tahap proses pengerjaan dan penyelsaian pembangunan rumah mahyani. Kesatuan tindakan diantara tim pelaksana kerja program pembangunan mahyani berpedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)

Komunikasi

Komunikasi adalah “suatu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan

baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain" (Handoko, 2002). Menurut Edward, "persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Setiap keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut". Tentunya komunikasi sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya berbagai macam interpretasi terhadap setiap kebijakan yang telah dikeluarkan, agar mampu meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat tidak terjalinya komunikasi dengan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan.

Menurut Winarno (2012), "jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, dimana komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran".

Adapun komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan dari para implementator tentang apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam hal ini kebijakan rumah layak huni di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Pada temuan observasi sebelumnya bahwa komunikasi yang kurang terbuka dari pihak pemerintah desa pun ikut berdampak pada keterlambatan pembagunan, dimana pemerintah desa dianggap kurang mampu memberikan penjelasan terhadap pemberhentian pembangunan rumah layak huni. Umumnya masyarakat tidak mengetahui kemana dana pembangunan rumah layak huni tersebut yang sudah dianggarkan dan belanja apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa selama pandemi ini masih ada

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, komunikasi Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni pada ruang-ruang tertentu saja sehingga tidak semua masyarakat bisa memahami program rumah layak huni

untuk masyarakat yang kurang mampu

Pembagian Kerja

Dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi, setiap anggota organisasi diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan baik dan penentuan tugas bagi masing-masing anggota tersebut dilakukan melalui proses pembagian kerja. T. Hani Handoko (2000:47) Pembagian kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspekaspek pekerjaan tertentu lainnya. Dengan adanya pembagian kerja, anggota organisasi dapat dilatih sesuai dengan bidangnya karena melalui keahlian yang dimilikinya tersebut sehingga anggota dapat memberi sumbangan maksimal terhadap pencapaian tujuan

Pembagian kerja juga dapat membantu dalam penempatan anggota organisasi dengan menggunakan prinsip the right man in the right place yaitu orang yang ditempatkan pada tempat yang tepat berdasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, ketrampilan, jenis kelamin, dan lain sebagainya sehingga akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efektivitas kerja

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pembagian kerja adalah bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dengan cara mendistribusikan setiap pekerjaan kepada setiap anggota dalam struktur organisasi berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota organisasi. Hasil observasi peneliti bahwa ditemukan keberpihakan aparat desa yang melakukan proses pendataan calon penerima bantuan sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa yang mendapatkan bantuan rumah layak huni di dominiasi oleh masyarakat yang memiliki kedekatan , kekerabatan atau kekeluargaan dengan aparat desa

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, pembagian kerja Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sudah optimal. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas dan fungsi kepada masing-masing pelaksana program pembangunan Mahyani yang ditandai dengan Surat Keputusan (SK) atau surat perintah tugas yang berdasarkan pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana program

Disiplin

Disiplin merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang dimaksud termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang karyawan. Jadi hal

ini merupakan suatu sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik oleh pihak manajemen. Banyak yang mengartikan disiplin itu bilamana karyawan selalu datang serta pulang tepat pada waktunya. Pendapat itu hanya salah satu yang dituntut oleh organisasi

Oleh karena itu kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (Hasibuan, 2009:212) Disiplin kerja dapat didefeinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menggelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. (Sastrohadiwiryo, 2003 :291). Sedangkan menurut Rivai, Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. (Rivai, 2009:824)

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi

Disiplin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kepatuhan para implementator dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Kedisiplinan ini dapat terlihat dari upaya para implementator menyelesaikan program rumah layak huni sesuai dengan tujuan dan apa yang telah direncanakan sebelumnya

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, disiplin para pelaksana Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari komitmen dari para pelaksana yang masih rendah dan tidak bekerja secara konsisten sehingga pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang tidak terselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya dan berdampak pada terbengkalainya pembangunan rumah masyarakat

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Koordinasi Lintas Sektor Program Pembagunan Mahyani di Desa Luhuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari keempat indikator yang diukur yakni kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin, dimana

terdapat dua indicator yang dianggap telah terpenuhi yakni indicator kesatuan tindakan dan pembagian kerja, hal ini terlihat dari adanya kesatuan pandangan dan pembagian tugas dan fungsi terkait dengan program pembangunan mahyani diantara stakeholder yang ada, mulai dari proses penentuan atau pengusulan nama-nama calon penerima bantuan hingga pada tahap proses pengerjaan dan penyelsaian pembangunan rumah mahyani. Sementara dua indicator lainnya dianggap belum terpenuhi yakni yakni indicator komunikasi dan indicator disiplin, hal ini terlihat dari masih kurang baiknya komunikasi stakeholder dengan kelompok sasaran serta komitmen dari para pelaksana yang masih rendah dan tidak bekerja secara konsisten sehingga pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang tidak terselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya dan berdampak pada terbengkalainya pembangunan rumah masyarakat

Saran;

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang peneliti tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Pemerintah Desa Luhuto sebaiknya membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni dari tahap perencanaan hingga penyelesaian pembangunan
2. Diharapkan kepada semua pelaksana kebijakan program pembangunan rumah layak huni untuk dapat memiliki etok kerja dan disiplin kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Perlunya Pemerintah Desa Luhuto untuk mengambil sikap atas pekerjaan rumah mahyani masyarakat yang belum terselesaikan hingga saat ini sehingga tidak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA.

Handoko, T. Hani. 2002. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi II. Penerbit Salemba Empat

Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta

Perbup Gorontalo Utara No 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni

Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Rivai, Veithzal (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sarwono Jonathan, (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan

Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu

Siswanto Sastrohadiwiryo. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.

Siti Mubaroqah, implementasi program pembangunan rumah layak huni di desa sanggatan utara tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Syafi'i (2019), Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Winarno, Budi 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Press